

## KONSEP PENYUSUNAN KERANGKA KERJA *BUSINESS* *CONTINUITY PLAN* TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

Anindita Alisia Amanda<sup>1)</sup>, Apol Pribadi Subriadi<sup>2)</sup>

Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi,  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Jalan Raya ITS No. 1, Surabaya, 60111  
Telp: (031) 5994251, Fax: (031) 5923465  
E-mail: apolpribadi@gmail.com

---

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menyusun sebuah kerangka Business Continuity Plan (BCP), yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan terkait keberlanjutan bisnis. Penyusunan kerangka dilakukan dengan melakukan formulasi antara kebutuhan dan tujuan perusahaan terkait keberlanjutan bisnis dengan sintesis kerangka BCP yang digunakan sebagai acuan yaitu, kajian panduan kerangka kerja (ISO 22301:2012), dan kajian empiris (Bank of Japan dan Dutch Financial Sector). Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa implementasi BCP di sebuah perusahaan merupakan sesuatu hal yang unik, di mana setiap implementasi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengharuskan perusahaan untuk aktif melakukan peningkatan secara terus-menerus (continuous improvement), mengingat kebutuhan perusahaan yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan regulasi pemerintah yang berlaku. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terletak di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keunikan obyek penelitian merupakan penentu utama BCP yang sesuai dengan kebutuhan.*

**Kata kunci:** Business Continuity Plan (BCP), ISO 22301:2012, Bank of Japan, Dutch Financial Sector, risiko, teknologi informasi.

### Abstract

*This research aims to develop framework of a Business Continuity Plan (BCP), which is accordance with the business continuity requirements of the company. This research is related to formulation framework between business continuity requirements and the synthesiz of standard references that used in this research like; ISO 22301:2012, Bank of Japan and Dutch Financial Sector. This research proves that BCP in a company is something unique, where each implementation Should be adjusted to the business continuity requirements of the company. The approach that used in this study requires companies to actively conduct continuous improvement. Because the business continuity requirements can change fluctuately, according to the development of information technology and banking regulations. This research is carried out in a rural bank in Central Java. The results showed that the uniqueness of the object of study is the major determinant of the BCP results that suit the needs.*

**Kata kunci:** Business Continuity Plan (BCP), ISO 22301:2012, Bank of Japan, Dutch Financial Sector, risiko, teknologi informasi.

### 1. PENDAHULUAN

Industri perbankan merupakan industri yang sangat penting bagi Indonesia. Dalam perkembangannya di Indonesia, layanan untuk nasabah menjadi fokus utama bagi industri perbankan, untuk terus ditingkatkan dengan cara memberikan fasilitas yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan [1]. Berdasarkan kondisi tersebut, metode yang dinilai tepat digunakan oleh industri ini adalah teknologi informasi dan sistem informasi (IT/IS).

Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan bank untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah, juga sekaligus dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, menjelaskan bahwa dengan meningkatkan risiko yang dihadapi, bank perlu menerapkan manajemen risiko secara efektif serta perlu adanya sebuah perencanaan keberlanjutan bisnis perusahaan atau *Business Continuity Planning* (BCP) [2].

Implementasi BCP di perusahaan perlu memperhatikan isu terkini, kondisi lingkungan perusahaan, serta terminologi atau tingkat pengetahuan kondisi perusahaan terhadap proses keberlanjutan bisnis. Selain itu, hal yang terpenting adalah BCP yang dibuat perlu memperhatikan kebutuhan atau aspek lokal yang ada di perusahaan [3].

Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu kerangka BCP yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dalam hal ini adalah sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki investasi teknologi informasi (TI) yang tinggi untuk di skala BPR, namun belum melakukan manajemen risiko dan perancangan BCP untuk melindungi aset bisnis dan TI yang dimiliki oleh perusahaan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Manajemen Risiko

Risiko (*risk*) adalah *effect of uncertainty on objectives*, atau dengan kata lain adalah sebuah efek yang ditimbulkan dari sebuah ketidakpastian dalam pencapaian tujuan-tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan [4]. Manajemen risiko adalah aktivitas yang terkoordinir untuk menjalankan dan mengawasi sebuah perusahaan atau organisasi dengan pendekatan risiko [4].

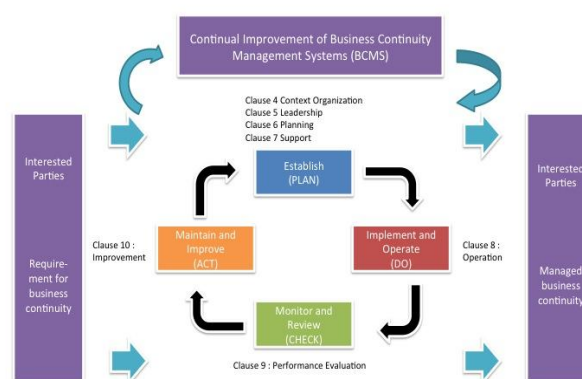
Ruang lingkup dari penelitian ini terdapat pada risiko dan manajemen risiko teknologi informasi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa manajemen risiko teknologi informasi adalah pengelolaan risiko teknologi informasi /sistem informasi pada sebuah organisasi atau perusahaan tertentu yang memiliki tujuan untuk meminimalisasi risiko yang mungkin muncul dengan solusi yang berhubungan dengan aspek teknologi informasi/sistem informasi.

### 2.2 Business Continuity Plan (BCP)

*Business Continuity Plan (BCP)* adalah prosedur yang telah terdokumentasi sebagai petunjuk untuk menanggapi, memulihkan, melanjutkan proses setelah adanya interupsi atau gangguan serta mengaktifkan sistem kembali (*respond, recover, resume, restore*) pada gangguan operasional tingkat standar yang telah ditetapkan sebelumnya [5]. Berdasarkan konsep ini, BCP dapat disusun dengan mengacu kepada (i) standard baku yang ada seperti ISO 22301:2012, (ii) *best practice* yang sudah sukses diterapkan pada industri yang serupa, seperti kerangka BCP *Bank of Japan* dan *Dutch Financial Sector*, atau lainnya.

### 2.3 ISO 22301:2012

ISO 22301:2012 merupakan sebuah standard internasional yang dibuat untuk mengatur dan mengelola sistem pengelolaan keberlangsungan bisnis atau *Business Continuity Management Systems (BCMS)* yang efektif [5]. Standard internasional ini menerapkan model PDCA (*Plan- Do- Check- Act*) untuk merencanakan, mendirikan, melakukan implementasi, memantau, meninjau, mengelola dan meningkatkan efektivitas secara terus-menerus dalam BCMS organisasi atau perusahaan. Model PDCA dipopulerkan oleh Dr. W. Edwards Deming, yang dikenal sebagai bapak *modern quality control* atau pengawasan kualitas moderen [6]. Gambar 1 adalah model PDCA yang diaplikasikan pada proses BCMS.



Gambar 8 Model PDCA ISO 22301:2012 (Sumber: ISO 22301,2012)

### 2.4 Kerangka Bank of Japan

*Bank of Japan (BOJ)* adalah sebuah perbankan milik pemerintah Jepang. Perusahaan ini memiliki prinsip bahwa sebuah institusi keuangan perlu memiliki BCP (*Business Continuity Plan*) untuk melindungi proses kritis perusahaan dari serangan teroris, bencana alam, permasalahan komputer atau gangguan lainnya yang dapat mengganggu keamanan sistem di perusahaan tersebut [7]. Konsep kerangka BCP BOJ dapat dilihat pada Gambar 2.

## 2.5 Kerangka *Dutch Financial Sector (DFS)*

Kerangka ini dibuat oleh keanggotaan perbankan di Belanda, yang terdiri dari ABN AMRO, ABN AMRO Clearing Bank, Currence, DNB, EMCF, Equens, Euroclear Nederland, ING, KAS BANK, LCH.Clearnet SA, Ministerie van Financiën, NVB, NYSE Euronext, Rabobank, RBS, SNS Bank, dan SWIFT Bank.

Prinsip-prinsip dalam kerangka atau standar ini dibuat untuk mempermudah setiap institusi keuangan dalam mengelola BCM (*Business Continuity Management*) di perusahaannya masing-masing. Kerangka ini juga disusun secara umum dan dapat diaplikasikan secara nyata oleh institusi keuangan [8]. Kerangka kerja BCP DFS dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 9 Kerangka BOJ (Sumber: BCP BOJ, 2003)



Gambar 10 Kerangka DFS (Sumber: DFS, 2011)

## 3. FORMULASI KERANGKA BCP

Proses formulasi kerangka BCP dilakukan dengan metode pendekatan mundur, yaitu menggali kebutuhan perusahaan untuk digunakan sebagai dasar dari formulasi kerangka BCP perusahaan (Subbab 3.2). Metode ini dipilih untuk dapat menghasilkan kerangka BCP yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga proses keberlanjutan bisnis dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

### 3.1 Obyek Penelitian

Studi kasus pada penelitian ini adalah BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara. Bank Perkreditan Rakyat ini terletak di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejak didirikan pada 1992, BPR ini selalu mendapat predikat SEHAT dari Bank Indonesia dan menjadi BPR peringkat pertama se-Jawa tengah dan ketiga se-Indonesia [9].

Fungsional dan proses bisnis yang terlibat pada penyusunan BCP perusahaan adalah 5 (lima) fungsional bisnis perusahaan, yaitu bagian Teknologi Sistem Informasi (TSI), Pembukuan, Personalia, Operasional dan Kredit. Alasan pemilihan 5 fungsional bisnis ini adalah berdasarkan tingkat ketergantungan proses bisnis yang berada di masing-masing fungsional tersebut. Kelima fungsional bisnis (lihat Tabel 1) memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap layanan teknologi dan sistem informasi yang ada, terutama dalam sistem *core banking*.

Fungsional bisnis yang terkait dalam pembuatan BCP di penelitian ini adalah:

1. Teknologi dan Sistem Informasi, berfungsi sebagai penyedia dan pemelihara layanan teknologi informasi dan sistem informasi yang ada di perusahaan.
2. Operasional, terkait secara langsung dengan produk bank seperti pembukaan rekening bank, tabungan, kredit dan deposito, sebagai bentuk pelayanan kepada nasabah.
3. Pembukuan, merupakan bagian yang terkait dengan neraca keuangan bank dan segala bentuk aktivitas pembukuan yang ada di bank.
4. Kredit, adalah bagian yang mengelola pelayanan dan pemantauan kredit kepada para debitur.
5. Personalia, adalah bagian yang bertugas untuk mengurus sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas dan proses bisnis bank secara internal.

*Tabel 10 Fungsional dan Proses Bisnis yang Terlibat dalam Penelitian (Sumber: Peneliti, 2014)*

FUNGSIONAL BISNIS	PROSES BISNIS TERKAIT SISTEM	FUNGSIONAL BISNIS	PROSES BISNIS TERKAIT SISTEM
TSI	Proses End-of-Day	Pembukuan	Pemindahbukuan Rekening Internal
	Input Tabel Parameter		Pemindahbukuan Multi Jurnal
	Modul User AS400		Posting Backdate
	LAPBUL (Laporan Bulanan)		Pembentukan PPAP
	Sistem Informasi Debitur (SID)		Pembentukan Amortisasi
	Pemasangan Perangkat Jaringan		Neraca
	Disaster Recovery Center (DRC)		LAPBUL (Laporan Bulanan)
	Perawatan Perangkat Keras	Kredit	Informasi Kolektabilitas dan NPL
Operasional	Input Data Nasabah		Sub Modul LAPBUL
	Tarik Tunai		Sistem Informasi Debitur (SID)
	Setoran Tunai	Personalia	Pengelolaan Data Karyawan
	Pembukaan Tabungan		Sistem Penggajian Karyawan
	Pembukaan Deposito dan Realisasi Kredit		
	Pembayaran Angsuran		

### 3.2 Proses Formulasi Kerangka BCP

Untuk melakukan formulasi kerangka kerja *Business Continuity Plan* di BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara, peneliti menggunakan pendekatan mundur. Pendekatan mundur di sini berarti, peneliti berusaha menggali kebutuhan dan keinginan dari pihak perusahaan terlebih dahulu. Kebutuhan yang digali berdasarkan keinginan dari pihak manajemen, khususnya bagian Teknologi dan Sistem Informasi (TSI) selaku penanggung jawab pengembangan teknologi informasi di perusahaan ini. Kebutuhan ini diambil dari Rencana Jangka Panjang Teknologi Sistem Informasi BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara yang dibuat pada tahun 2013.

Setelah penggalan kebutuhan dan keinginan perusahaan, dilakukan penyesuaian dengan studi komparasi kerangka kerja BCP acuan yaitu komparasi terhadap ISO 22301:2012, *Bank of Japan* dan *Dutch Financial Sector*. Gabungan studi komparasi kerangka kerja BCP dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan tersebut, maka dihasilkan sebuah kerangka kerja BCP yang sesuai dengan kebutuhan BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara. Gambar 2 adalah skema pendekatan mundur pada penelitian ini.



Gambar 2 Pendekatan Mundur pada Penelitian (Sumber: Peneliti, 2014)

### 3.2.1. Penggalan Kebutuhan Perusahaan

Penggalan kebutuhan perusahaan dan verifikasiya dikhususkan pada kebutuhan perusahaan akan proses keberlanjutan bisnis (lihat Tabel 2). Penggalan kebutuhan ini dilakukan dengan metode sebagai berikut.

1. Wawancara dengan pimpinan di bagian TSI.
2. Penyesuaian dengan Rencana Jangka Panjang Teknologi dan Sistem Informasi BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara.

Tabel 11 Kebutuhan dan Keinginan Perusahaan terhadap BCP (Sumber: Peneliti, 2014, diolah)

KEBUTUHAN DAN KEINGINAN PERUSAHAAN	STATUS
1. BCP yang dibuat harus mencakup risiko di bidang teknologi informasi di perusahaan.	Terverifikasi
2. BCP yang dibuat harus dapat mengurangi risiko yang timbul dari implementasi teknologi informasi.	Terverifikasi
3. BCP yang dibuat dapat digunakan dalam waktu jangka panjang.	Terverifikasi
4. BCP yang dibuat harus memperhatikan aspek kemudahan dan kesederhanaan desain.	Terverifikasi
5. BCP yang dibuat harus dapat sesuai dengan teknologi yang sudah diterapkan.	Terverifikasi
6. BCP yang dibuat harus melibatkan perusahaan, dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) secara utuh.	Terverifikasi
7. BCP yang dibuat harus memperhatikan keberlanjutan operasional bisnis perusahaan.	Terverifikasi
8. BCP yang dibuat untuk perbankan, harus dapat mengatasi kebutuhan sistem keamanan yang tinggi.	Terverifikasi
9. BCP yang dibuat mendukung tata kelola TI perusahaan (prosedur DRC, DRP dan <i>Contingency Plan</i> ).	Terverifikasi
10. BCP yang dibuat harus dinamis, yaitu dapat mengikuti perkembangan dunia teknologi informasi.	Terverifikasi

### 3.2.2 Sintesis Standar Kerangka Kerja BCP

Metode yang digunakan dalam penyusunan kerangka BCP dalam penelitian ini adalah melakukan sintesis dari masing-masing kerangka BCP yang telah disebutkan pada tinjauan literatur (ISO 22301:2012; BOJ dan DFS), untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan. Peneliti melakukan pemetaan terhadap kebutuhan perusahaan dengan sebuah model iteratif manajemen, yang dikenal juga sebagai PDCA (*Plan-Do-Check-Act*). Alasan pemilihan bentuk model ini adalah, karena ini akan memudahkan perusahaan dalam memantau, mengembangkan serta mengingat fase dari kerangka kerja BCP yang harus ditingkatkan secara terus-menerus untuk mendapatkan performa yang optimal.

Kelebihan dari kerangka BCP ISO 22301:2012 adalah sebuah kerangka yang komprehensif, di mana pada setiap fasenya memiliki proses-proses yang melingkupi seluruh lini dari sebuah proses keberlanjutan bisnis di perusahaan. Sungguhpun demikian kerangka ini tidak bisa sepenuhnya langsung diimplementasikan di BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara, karena salah satu kebutuhan di perusahaan tersebut menyatakan bahwa kerangka BCP yang dibuat harus sederhana dan mudah dimengerti. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi kerangka mengingat tingkat kompleksitas yang begitu tinggi dan konteks kalimat yang terlalu teoritis membuat kerangka ini tidak nampak sederhana dan sulit untuk dimengerti oleh orang awam.

*Bank of Japan* (BOJ) membuat sebuah kerangka kerja untuk melakukan BCP pada institusi keuangan yang ada di Jepang. Kerangka ini dinilai cukup operasional dan cukup sesuai dengan implementasi di dunia perbankan. Namun kerangka ini tidak bisa sepenuhnya diimplementasikan secara langsung tanpa pengubahan di BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara. Hal ini dikarenakan, adanya kebutuhan BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara yang menyatakan bahwa kerangka BCP yang dibuat harus dinamis dengan perkembangan teknologi informasi atau

dengan kata lain perlu adanya upaya untuk melakukan peningkatan secara terus-menerus (*continuous improvement*) dalam fase BCP yang akan diimplementasikan di perusahaan tersebut.

Jika dibandingkan dengan kerangka sebelumnya, kerangka ini hanya mencakup fase perencanaan (*plan*), pengerjaan (*do*) dan sebagian pemeriksaan (*check*) saja, yaitu hanya sampai tahap pengujian dan peninjauan. Dalam kerangka ini belum terdapat fase tindakan (*act*) untuk melakukan peningkatan secara terus-menerus yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Sementara itu *Dutch Financial Sector* memiliki kerangka yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami, tetapi lemah dalam hal memahami alur atau keterkaitan antar setiap tahapannya. Terkait dengan kelebihan dan kekurangan ketiga kerangka BCP acuan tersebut, maka BPR Bank Surya Yudha tidak dapat secara langsung mengimplementasikan ketiga kerangka ini di perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa unsur dari kebutuhan perusahaan yang belum terpenuhi, seperti kebutuhan khusus dalam konteks perusahaan, sumber daya yang dibutuhkan serta belum adanya fase tindakan (*act*) untuk melakukan peningkatan secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Dari sintesis ketiga standar kerangka BCP yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, dihasilkan sebuah rancangan implementasi berdasarkan ISO 22301:2012, BOJ dan DFS. Dari ISO 22301:2012 diadopsi konsep penerapan model PDCA dan tata urutan penyusunan BCP yang komprehensif. Dari Bank of Japan, diadopsi *content* (isi) yang terdapat pada beberapa fase yang tersedia, terutama pada alur komunikasi, serta dari *Dutch Financial Sector* adalah konsep kederhanaan urutan tata kelola teknologi informasi dalam mengkonstruksi BCP di perusahaan. Asimilasi dari ketiga konsep ini digunakan untuk melakukan formulasi dan kesesuaian adengan kebutuhan keberlanjutan bisnis yang dimiliki oleh perusahaan.

### 3.2.3 Kesesuaian Kerangka BCP dengan kebutuhan perusahaan

Kesesuaian kerangka BCP dengan kebutuhan perusahaan dilakukan dengan memetakan kebutuhan perusahaan ke dalam fase PDCA yaitu, perencanaan (*plan*), pengerjaan (*do*), pemeriksaan (*check*) dan tindakan (*act*). Berdasarkan pemetaan kebutuhan perusahaan dengan fase PDCA, maka dapat ditentukan tahapan proses yang disusun menjadi kerangka BCP yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kerangka BCP tersebut merupakan formulasi dari ketiga kerangka BCP yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dari ISO 22301:2012, *Bank of Japan* dan *Dutch Financial Sector*. Tabel 3 berikut ini adalah pemetaan kesesuaian kerangka kerja BCP dengan Kebutuhan Perusahaan.

Tabel 12 Pemetaan Kebutuhan Perusahaan dengan Fase dan Kerangka BCP (Sumber: Peneliti, 2014)

FASE	KEBUTUHAN PERUSAHAAN	KERANGKA BCP UNTUK PERUSAHAAN
PLAN	BCP yang dibuat harus melibatkan perusahaan, dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) secara utuh.	Profil Perusahaan SDM (Karyawan dan Pimpinan) yang terlibat
	BCP yang dibuat harus dapat mendukung tata kelola teknologi informasi yang diterapkan di perusahaan	Tata Kelola Teknologi Informasi
	BCP yang dibuat harus dapat sesuai dengan teknologi yang sudah diterapkan.	Perangkat Sumber Daya
DO	BCP yang dibuat harus mencakup risiko di bidang teknologi informasi di perusahaan.	Analisis Dampak Bisnis Manajemen Risiko
	BCP yang dibuat harus dapat mengurangi risiko yang timbul dari implementasi teknologi informasi.	Penilaian Risiko Perlakuan Risiko (Mitigasi)
	BCP yang dibuat harus memperhatikan keberlanjutan operasional bisnis perusahaan.	Prosedur Keberlanjutan Bisnis
	BCP yang dibuat untuk perbankan, harus dapat mengatasi kebutuhan sistem keamanan yang tinggi di perusahaan.	Prosedur Keamanan Informasi
CHECK	BCP yang dibuat dapat digunakan dalam waktu jangka panjang.	Peninjauan Manajemen Internal Audit
ACT	BCP yang dibuat harus dinamis, yaitu dapat mengikuti perkembangan dunia teknologi informasi.	Peningkatan secara terus menerus ( <i>Continuous Improvement</i> )

Untuk mendapatkan hasil yang paling tepat dan sesuai, maka dilakukan formulasi antara kebutuhan perusahaan dengan korelasi ketiga kerangka kerja BCP yang digunakan dalam penelitian ini, lihat Gambar 3.



Gambar 3. Formulasi Kebutuhan Perusahaan dengan Kerangka BCP (Sumber: Peneliti, 2014, diolah)

### 3.2.4 Hasil Kerangka BCP BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara

Berdasarkan kebutuhan perusahaan yang telah ditetapkan, dan analisis sintesis dari 3 standar kerangka BCP yang digunakan (ISO 22301:2012, *Bank of Japan*, *Dutch Financial Sector*), maka diformulasi kerangka BCP yang sesuai dengan kebutuhan BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara. Gambar 4 adalah kerangka BCP BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara.



Gambar 4. Kerangka BCP BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara (Sumber: Peneliti, 2014, diolah)

Setiap fase atau tahapan proses dalam kerangka BCP tersebut, tidak terlepas dari kebutuhan perusahaan dan acuan yang digunakan, yaitu 3 standar kerangka BCP (ISO 22301:2012, *Bank of Japan*, *Dutch Financial Sector*). Tabel 4 menyajikan pemetaan setiap fase kerangka BCP dengan acuan yang digunakan.

Tabel 13 Acuan yang digunakan dalam Kerangka BCP (Sumber: Peneliti, 2014, diolah)

FASE	SUB-FASE	ACUAN
PLAN (PERENCANAAN)	Profil Perusahaan	ISO 22301:2012
	Ruang Lingkup BCP	ISO 22301:2012 Dutch Financial Sector
	Tujuan BCP	ISO 22301:2012 Bank of Japan Dutch Financial Sector
	Sumber Daya	ISO 22301:2012 Bank of Japan Dutch Financial Sector
	Tata Cara Komunikasi	ISO 22301:2012 Bank of Japan
	Tata Kelola TI	Dutch Financial Sector

FASE	SUB-FASE	ACUAN
DO (PENGERJAAN)	Analisis Dampak Bisnis	ISO 22301:2012 Bank of Japan Dutch Financial Sector
	Manajemen Risiko	ISO 22301:2012 Bank of Japan Dutch Financial Sector
	Strategi Keberlanjutan Bisnis	ISO 22301:2012 Dutch Financial Sector
	Prosedur Keberlanjutan Bisnis	ISO 22301:2012 Bank of Japan Dutch Financial Sector
	Pelatihan dan Pengujian	ISO 22301:2012 Bank of Japan Dutch Financial Sector
CHECK (PEMERIKSAAN)	Audit Internal TI Bagian	ISO 22301:2012
	Audit Internal TI Perusahaan	ISO 22301:2012
	Peninjauan Manajemen	ISO 22301:2012
ACT (TINDAKAN)	Peningkatan Secara Terus-Menerus	ISO 22301:2012

Berdasarkan pemetaan di atas, dapat diamati pada setiap fase di Kerangka BCP BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara, ada yang sepenuhnya mengacu dari 3 standar yang digunakan, namun ada fase yang hanya mengacu kepada 1 atau 2 standar kerangka saja. Hal tersebut dilakukan agar setiap fase yang ada benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam implementasinya, pembuatan BCP harus dilandasi oleh kebutuhan di perusahaan masing-masing. Karena pada dasarnya tidak ada suatu standar atau *best practice* BCP manapun yang tepat secara keseluruhan untuk sebuah perusahaan. Setiap standar BCP yang ada perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan perusahaan, dengan menggunakan analisis sintesis yaitu mengambil yang sesuai dan tidak mengambil yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Kerangka BCP dengan proses pendekatan mundur (melakukan analisis kebutuhan perusahaan terlebih dahulu, baru melakukan sintesis standar kerangka BCP yang digunakan, serta melakukan formulasi standar Kerangka BCP agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan) memerlukan sebuah fase peningkatan secara terus-menerus (*continuous improvement*) yang kuat dan dilakukan secara periodik. Hal ini dilakukan karena kebutuhan perusahaan dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang dinamis maupun regulasi (peraturan BI, peraturan institusi lainnya) yang berubah atau berkembang sesuai dengan kondisi perbankan di dunia.

Untuk memastikan bahwa Kerangka BCP ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka langkah-langkah penyusunan BCP ini dapat dilakukan secara empiris di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) lainnya. Hal ini akan menunjukkan pentingnya manajemen risiko di dunia perbankan, khususnya di BPR, dimana risiko pada setiap BPR adalah unik dan khas. Hal tersebut juga membuktikan bahwa Kerangka BCP yang dibuat juga bersifat unik, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan setempat.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Infobank, Infobank Analisis Strategi Perbankan dan Keuangan, Jakarta: Infobank, 2008.
- [2] Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 9/15/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Jakarta, 2007.
- [3] J. Pinta, "Disaster Recovery Planning as part of Business Continuity Management," *ProQuest*, vol. 3, no. 4, pp. 55-61, 2011.
- [4] International Standard Organization, ISO 31000:2009 Risk Management-Principles and Guideline, Geneva: International Standard Organization, 2009.

- [5] International Standard Organization, ISO 22301:2012, Societal Security – Business Continuity Management Systems – Requirements, Geneva: International Standard Organization, 2012.
- [6] C. Anderson, How Are PDCA Cycle Used, 2011.
- [7] Bank of Japan, “Business Continuity Planning at Financial Institutions,” Tokyo, Bank of Japan, 2003.
- [8] Working Group BCM Requirements-Dutch Financial Sector, “Principles for BCM Requirements for the Dutch Financial Sector and its providers,” Dutch Financial Sector, 2011.
- [9] Infobank, “Infobank Analisis Strategi Perbankan dan Keuangan,” Infobank, Jakarta, 2011.